

Hakikat, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A.



PENDAHULUAN

Modul ini merupakan materi awal mata kuliah Pembelajaran PKn di SD (PDGK4201). Tentunya bagi Anda tidaklah asing terhadap istilah pendidikan kewarganegaraan karena istilah itu merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Anda pasti sudah mengenalnya dengan baik.

Dalam modul ini kita akan mempelajari ciri-ciri pokok atau karakteristik dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Pada akhir pembahasan modul, diharapkan Anda memperoleh kemampuan sebagai berikut:

1. menjelaskan hakikat, fungsi, dan tujuan PKn di SD;
2. menjelaskan ruang lingkup PKn di SD;
3. menguraikan tuntutan pedagogis PKn di SD;

Pemahaman terhadap hakikat, fungsi, dan tujuan PKn di SD sangatlah penting bagi Anda sebagai guru agar Anda mengerti betul tentang apa, mengapa, dan untuk apa PKn di SD. Pengertian semua itu merupakan modal dasar dalam pelaksanaan tugas profesional Anda. Anda akan merasa yakin dan percaya diri dalam mengajarkan PKn di SD. Apabila ada pertanyaan dari murid Anda, dengan mudah dan tanpa ragu Anda akan dapat menjawabnya dengan jelas dan mudah dipahami.

Pembahasan materi untuk mencapai semua kemampuan tersebut di muka akan diuraikan dalam buku pembahasan sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Hakikat, fungsi, dan tujuan PKn di SD.

Kegiatan Belajar 2: Ruang Lingkup PKn di SD.

Kegiatan Belajar 3: Tuntutan Pedagogis PKn di SD.

Materi dan latihan yang ada dalam kedua kegiatan belajar tersebut akan dapat Anda cerna dengan mudah bila Anda mempraktikkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pahami setiap konsep atau prinsip yang dibagikan dengan cara memahami ciri dan contoh yang diberikan dan mencari contoh lainnya secara aktif.
2. Mantapkan pemahaman Anda melalui refleksi atau pengendapan sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain.
3. Manfaatkan pertemuan tutorial untuk memantapkan pengertian Anda, terutama mengenai konsep atau prinsip yang masih menjadi masalah buat Anda.

KEGIATAN BELAJAR 1**Hakikat, Fungsi, dan Tujuan PKn di SD**

Tentu Anda masih ingat, dalam kurikulum Pendidikan Dasar 94, terdapat mata pelajaran "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", yang disingkat PPKn. Istilah "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", pada saat itu secara hukum tertera dalam Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak diundangkannya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 secara hukum istilah tersebut sudah berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, nama mata pelajaran tersebut di SD berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Apabila kita kaji secara historis-kurikuler mata pelajaran tersebut telah mengalami pasang surut pemikiran dan praksis. sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini. Oleh karena itu, dalam Kegiatan Belajar 1 ini, kita akan mengkaji perkembangan mata pelajaran itu. Dengan cara itu, kita akan dapat membandingkan karakteristik mata pelajaran yang serupa dalam berbagai konteks dan kurun waktu. Secara singkat kita akan menganalisis setiap kurikulum tersebut. Tentu saja tidak akan dilakukan secara tuntas karena hal itu tidak merupakan cakupan modul dan mata kuliah ini. Hal yang akan kita bahas hanyalah mengenai status dan isi mata pelajaran sejenis mata pelajaran tersebut dalam kurikulum-kurikulum tersebut.

Dalam Kurikulum 1946, Kurikulum 1957, dan Kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam kurikulum 1946 dan 1957 materi tersebut itu dikemas dalam mata pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di SMP dan SMA. Baru dalam Kurikulum SD tahun 1968 dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics yang diartikan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum SMP 1968 PKN tersebut mencakup materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam kurikulum SMA 1968 PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945. Sementara itu,, menurut kurikulum SPG 1969 PKN mencakup sejarah

Indonesia, UUD, Kemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pengetahuan Kewargaan Negara. Sedikit berbeda, menurut kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan) 1973 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial untuk SD 8 tahun yang berisikan integrasi materi ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan di Sekolah Menengah 4 tahun selain "Studi Sosial" terpadu, juga terdapat mata pelajaran "PKN" sebagai program inti dan "Civics dan Hukum" sebagai program utama pada jurusan sosial.

Dalam wacana yang berkembang selama ini ada dua istilah yang perlu dibedakan, yakni kewargaannegara dan kewarganegaraan. Seperti dibahas oleh Somantri (1967) istilah *Kewargaannegara* merupakan terjemahan dari "Civics" yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan *membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (good citizen)*. Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik" (Somantri 1970) atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara" (Winataputra 1978). Di lain pihak, istilah *kewarganegaraan* digunakan dalam perundangan mengenai *status formal warga negara* dalam suatu negara, misalnya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1949 dan peraturan tentang diri kewarganegaraan serta peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi orang-orang atau warga negara asing. Namun demikian, kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep *citizenship*, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada *status hukum (legal standing)* dan *karakter* warga negara, sebagaimana digunakan dalam perundang-undangan kewarganegaraan untuk status hukum warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk program pengembangan karakter warga negara secara kurikuler.

B. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan yang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama. Jika dirunut secara

yuridis ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat tersebut, sebagai berikut.

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Perubahannya (UUD 1945 dan Perubahannya), khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) khususnya:
 - a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
 - b. Pasal 4 mengatakan sebagai berikut.
 - 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 - 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
 - 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- c. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.
- d. Pasal 38 ayat yang menyatakan bahwa ”Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP). Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kurikulum SD/MI/ SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari:
- a. kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

4. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Setiap kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik”
5. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Dalam konteks itu, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah seyogianya dikembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh-kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Kualitas pribadi ini sangat penting karena akan menjadi bekal untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dengan sikap dan perilakunya dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kesehatan, ilmu, kecakapan, kreativitas, dan kemandirian. Oleh karena itu, sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. Dengan demikian, secara bertahap sekolah akan menjadi komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta keharmonisan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. Dalam kerangka semua itu mata pelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menyadari betapa pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka dengan melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun

kehidupan demokrasi. Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang demokratis melalui pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial warga negara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah pada hari ini dan hari esok. Karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara konsisten atau ajek, mau dan mampu memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan zaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi melalui PKN yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi-jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada: (1) pandangannya yang pluralistik-uniter (bermacam-macam, tetapi menyatu dalam pengertian *Bhinneka Tunggal Ika*), (2) sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis, (3) *tujuannya* yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); dan (4) *konteks (setting)* yang menghasilkan *pengalaman belajarnya* yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Apabila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menuntut hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia. *Kedua*, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu. *Ketiga*, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. *Keempat*, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan

demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. Situasi sekolah dan kelas dikembangkan demikian rupa sebagai *democratic laboratory* atau *lab demokrasi* dengan lingkungan sekolah/kampus yang diperlakukan sebagai *micro cosmos of democracy* atau lingkungan kehidupan yang demokratis yang bersifat mikro, dan memperlakukan masyarakat luas sebagai *open global classroom* atau sebagai kelas global yang terbuka. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah makna dari konsep “*learning democracy, in democracy, and for democracy*”- belajar tentang demokrasi, dalam situasi yang demokratis, dan untuk membangun kehidupan demokratis *dengan PKn sebagai wahana kurikuler yang utama.*



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Sebagai latihan, Anda diminta untuk menuliskan dalam satu alinea dengan 5 kalimat, yang mendeskripsikan secara lengkap tentang apa, mengapa dan untuk apa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di berikan di SD/MI. Tuliskan pula kata kunci yang terkandung dalam deskripsi Anda!

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari kembali materi yang berkaitan dengan hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD!



RANGKUMAN

1. Mata pelajaran *PKn* di SD menurut Standar Isi 2006, merupakan *perkembangan terbaru* dari mata pelajaran yang sama dalam label yang berbeda sejak kurikulum SD 1968.

2. Dalam kurikulum SD 1968 terdapat mata pelajaran *Pendidikan Kewargaan Negara* (PKN) yang di dalamnya mencakup materi *geografis* dan *sejarah Indonesia* serta *Civics* atau kewargaan negara.
3. Dalam kurikulum SD 1975 dan kurikulum SD 1984 mata pelajaran PKN tersebut namanya berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
4. Menurut kurikulum Dikdas 1994 mata pelajaran itu diberi label *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (kemudian dipakai singkatan PPKn). Isi mata pelajaran ini pada dasarnya mencakup konsep dan nilai Pancasila sebagai materi yang harus dipahami, dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai usia dan lingkungannya.
5. Konsep *Kewargaan Negara* yang semula secara khusus membahas masalah hak dan kewajiban warga negara, dan konsep *kewarganegaraan* yang semula secara khusus membahas masalah status politik warga negara, telah berkembang menjadi konsep *kewarganegaraan* dalam arti luas yang *mencakup baik mengenai hak dan kewajiban maupun status warga negara*. Kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua-duanya dengan istilah *kewarganegaraan* yang secara konseptual diadopsi dari konsep *citizenship*, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada *status hukum (legal standing)* dan *karakter* warga negara.
6. Tujuan dan isi PPKn SD 1994 *berkenaan dengan konsep nilai, moral dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 serta penjabarannya dalam sumber hukum di bawah UUD 45*. Untuk tingkat sekolah dasar, kurikulum PPKn SD 1994 menjabarkan konsep, nilai, moral dan norma Pancasila dan UUD 45 itu secara "Berjenjang berkelanjutan semakin meluas" mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI.
7. Patut digarisbawahi isi Pasal 3 UU Sisdiknas 20/2003 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
8. Pasal 6 ayat (1) PP N0.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa Kurikulum SD/MI/ SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari:

- a. kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
9. Pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai *pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi*.
10. Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Mata pelajaran *PKn* di SD menurut Standar Isi 2006, secara konseptual merupakan *perkembangan terbaru* dari mata pelajaran yang
 - A. sama dalam label yang berbeda sejak kurikulum SD 1968
 - B. sama sekali berbeda baik dalam tujuan maupun isi
 - C. sama saja dengan kurikulum SD tahun 1994
 - D. sama dalam misinya, tetapi berbeda dalam visi kurikulumnya
- 2) Dalam kurikulum mana terdapat mata pelajaran *Pendidikan Kewargaan Negara (PKN)* yang di dalamnya mencakup materi *Geografis* dan *Sejarah Indonesia* serta *Civics* atau kewargaan negara
 - A. Kurikulum Sekolah Rakyat tahun 1946
 - B. Kurikulum Sekolah Rakyat tahun 1961
 - C. Kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968
 - D. Kurikulum SD PPSP tahun 1973

- 3) Dalam kurikulum SD 1975 dan kurikulum SD 1984 mata pelajaran PKN tersebut namanya berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) karena alasan
- Adanya usulan dari Pemerintah
 - Berubahnya landasan hukum
 - Agar lebih sesuai dengan isinya
 - Penyesuaian dengan produk hukum MPR
- 4) Menurut kurikulum Dikdas 1994 mata pelajaran itu diberi label *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (kemudian dipakai singkatan PPKn). Isi mata pelajaran ini pada dasarnya mencakup konsep dan nilai Pancasila sebagai materi yang harus
- dipahami sejarah lahirnya dan perumusannya
 - dihayati nilai moral yang terkandung di dalamnya
 - diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara utuh
 - dilaksanakan sesuai usia dan lingkungannya.
- 5) Konsep *Kewargaan Negara* yang semula secara khusus membahas masalah hak dan kewajiban warga negara, dan konsep *kewarganegaraan* yang semula secara khusus membahas masalah status politik warga negara, telah berkembang menjadi
- konsep kewarganegaraan dalam arti luas yang mencakup baik mengenai hak dan kewajiban maupun status warga negara
 - paduan kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua makna kewarganegaraan
 - konsep kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep citizenship
 - makna umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum (*legal standing*)
- 6) Tujuan dan isi PPKn SD 1994 *berkenaan dengan konsep nilai*, moral dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 serta penjabarannya dalam sumber hukum di bawah UUD 45. Untuk tingkat sekolah dasar, kurikulum PPKn SD 1994 menjabarkan konsep, nilai, moral dan norma Pancasila dan UUD 45 itu secara
- berjenjang mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI
 - berjenjang berkelanjutan mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI
 - berjenjang semakin meluas mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI
 - berjenjang berkelanjutan semakin meluas mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI

- 7) Esensi tujuan pendidikan nasional yang merupakan porsi utama PKn adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
 - berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif
 - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis
 - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
- 8) Menurut Pasal 6 ayat (1) PP N0. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mata pelajaran PKn dalam Kurikulum SD/MI/SDLB/Paket
- kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
 - kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
 - kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial
 - kelompok mata pelajaran estetika dan kebudayaan
- 9) Pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai
- pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis
 - pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi
 - pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup untuk membangun kehidupan demokrasi
 - pusat pengembangan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi
- 10) Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa
- dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis
 - dapat belajar demokrasi untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis

- C. dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara dan membangun kehidupan yang lebih demokratis
- D. dapat belajar demokrasi untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Ruang Lingkup PKn di SD**

Ⓓalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa "Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945", sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas, " adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi."

Sementara itu, ditetapkan pula bahwa "Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Secara keseluruhan untuk SD/MI dalam Permendiknas tersebut ditetapkan Struktur Kurikulum yang secara esensial dikemukakan sebagai berikut.

Struktur Kurikulum SD/MI

Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. “Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 1.1.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

- b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
- c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
- d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
- f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34–38 minggu.”

Struktur kurikulum SD/MI disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Struktur Kurikulum SD/MI

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				2*)
Jumlah	26	27	28	32

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. **Persatuan dan Kesatuan bangsa**, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
- b. **Norma, hukum dan peraturan**, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- c. **Hak asasi manusia**, meliputi Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM

- d. **Kebutuhan warga negara**, meliputi hidup gotong-royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
- e. **Konstitusi Negara**, meliputi Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. **Kekuasaan dan Politik**, meliputi Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi—Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
- g. **Pancasila**, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. **Globalisasi**, meliputi Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.”

Khusus untuk SD/MI lingkup isi Pendidikan Kewarganegaraan dikemas dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, yang secara sekuensial diorganisasikan sebagai berikut.

Kelas I, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan	1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah 1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah
2. Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah	2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah

Kelas I, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah	3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya 3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah
4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah	4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah 4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat

Kelas II, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Membiasakan hidup bergotong royong	1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong 1.2 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah
2. Menampilkan sikap cinta lingkungan	2.1 Mengenal pentingnya lingkungan alam, seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan 2.2 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam

Kelas II, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap demokratis	3.1 Mengenal kegiatan bermusyawarah 3.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas) 3.3 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan
4. Menampilkan nilai-nilai Pancasila	4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari 4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari

Kelas III, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda	1.1 Mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa 1.2 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat	2.1 Menegal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar 2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar 2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar

Kelas III, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memiliki harga diri sebagai individu	3.1 Menegal pentingnya memiliki harga diri 3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri 3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri
4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia	4.1 Menegal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinnekaan, kekayaan alam, keramatahman 4.2. Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan	1.1 Menegal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan 1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi	2.1 Menegal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menegal sistem pemerintahan tingkat pusat	3.1 Menegal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK. 3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya	4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah 2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memahami kebebasan berorganisasi	3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah
4. Menghargai keputusan bersama	4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 4.2 Mematuhi keputusan bersama

Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia	2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada 2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen 2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	3.1 Menjelaskan pengertian kerja sama negara-negara Asia Tenggara 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara
4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi	4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif 4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Sebagai latihan Anda secara berpasangan (setiap dua orang) diminta untuk berdiskusi dan memberi contoh perilaku warga negara berkenaan dengan esensi tujuan PKN sebagai berikut.

- 1) Tuliskan satu contoh perilaku berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan di lingkungan sekitar!
- 2) Tuliskan 3 contoh kegiatan siswa dalam rangka berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi!

- 3) Tuliskan satu contoh ciri perkembangan secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya!
- 4) Tuliskan dua contoh interaksi warga negara dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk dapat menuliskan contoh tentang perilaku berpikir secara kritis rasional dan kreatif Anda dapat mengingat kembali atau membaca bagian materi tentang perilaku berfikir kritis, rasional dan kreatif.
- 2) Coba Anda pelajari kembali pembahasan tentang bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!
- 3) Anda pelajari kembali tentang materi ciri perkembangan secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia!
- 4) Coba, Anda baca kembali pembahasan tentang interaksi warga negara dengan memanfaatkan, teknologi informasi dan komunikasi!



RANGKUMAN

1. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
2. Secara umum PKn di SD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan **dunia** secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.
5. Muatan materi tentang **Persatuan dan Kesatuan bangsa**, meliputi Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
6. Muatan materi tentang **Norma, hukum dan peraturan**, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
7. Muatan materi tentang **Hak asasi manusia**, meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
8. Muatan materi tentang **Kebutuhan warga negara**, meliputi: Hidup gotong-royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
9. Muatan materi tentang **Konstitusi Negara**, meliputi Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
10. Muatan materi tentang **Kekuasaan dan Politik**, meliputi Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

11. Muatan materi tentang **Pancasila**, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
12. Muatan materi tentang **Globalisasi**, meliputi Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.”



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
 - A. pengembangan potensi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
 - B. pewarisan nilai kepada warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
 - C. pendewasaan warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
 - D. pengondisian warga negara secara sosial agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
- 2) Tujuan PKN di SD yang memiliki dimensi perilaku sosial-psikologis dan kultural-kosmopolitan adalah
 - A. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
 - B. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi

- C. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
 - D. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 3) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum, mencerminkan bahwa PKN SD menganut prinsip
- A. belajar sosial
 - B. belajar perubahan perilaku
 - C. belajar tuntas
 - D. belajar kognitif
- 4) Struktur kurikulum SD/MI, meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran, mencerminkan bahwa kurikulum PKN SD menganut ketuntasan belajar pada tingkat
- A. mata pelajaran
 - B. kelas
 - C. satuan pendidikan
 - D. jenjang pendidikan
- 5) Muatan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa, yang berkenaan dengan wawasan demokrasi adalah
- A. hidup rukun dalam perbedaan dan cinta lingkungan
 - B. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan Sumpah Pemuda
 - C. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan
 - D. partisipasi dalam pembelaan negara dan Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6) Muatan materi tentang norma, hukum dan peraturan, yang mencerminkan perilaku demokratis adalah
- A. tertib dalam kehidupan keluarga
 - B. tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat

- C. peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - D. sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional
- 7) Muatan materi tentang hak asasi manusia yang mencerminkan upaya pelaksanaan rancangan aksi nasional HAM adalah
- A. hak dan kewajiban anak
 - B. hak dan kewajiban anggota masyarakat
 - C. instrumen nasional dan internasional HAM
 - D. pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
- 8) Muatan materi tentang kebutuhan warga negara yang mencerminkan sikap demokratis adalah
- A. hidup gotong-royong, prestasi diri
 - B. harga diri sebagai warga masyarakat
 - C. kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat
 - D. menghargai keputusan bersama, persamaan kedudukan warga negara
- 9) Muatan materi tentang konstitusi negara yang memiliki dimensi wawasan demokrasi tentang logika konstitusional adalah
- A. Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945
 - B. Konstitusi RIS 1949
 - C. UUD Sementara 1950
 - D. hubungan dasar negara dengan konstitusi
- 10) Muatan materi tentang Pancasila yang berkenaan dengan pembiasaan hidup demokratis adalah
- A. kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
 - B. proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
 - C. pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - D. Pancasila sebagai ideologi terbuka

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Tuntutan Pedagogis PKn di SD

Istilah *pedagogis* diserap dari bahasa Inggris *paedagogical*. Sesungguhnya akar katanya adalah *paes* dan *ago* (bahasa latin), artinya saya membimbing. Kemudian, muncul istilah *paedagogy* yang artinya ilmu mendidik atau ilmu pendidikan (Purbakawatja 1956). *Tuntunan pedagogis* dalam modul ini diartikan sebagai *pengalaman belajar (learning experiences)* yang bagaimana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar.

Marilah kita menyimak implikasi dari lingkup isi PKn SD/MI terhadap esensi kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berikut ini contoh implikasi dari tuntutan isi PKn terhadap wawasan demokrasi, sikap demokratis dan tanggung jawab, saerta perilaku demokratis.

Contoh jabaran
Wawasan Demokrasi, dan Sikap serta Perilaku Demokratis di SD/MI
Merujuk pada Standar Isi (BSNP)

No.	Lingkup isi PKN-BSNP	Kualitas Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab		
		Wawasan Demokrasi	Sikap Demokratis dan Tanggung Jawab	Perilaku Demokratis
1.	Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Sumpah Pemuda Pemuda Keutuhan NKRI Jaminan Keadilan	Sumpah Pemuda sebagai keputusan nasional organisasi kepemudaan dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 Keutuhan NKRI sebagai komitmen nasional seluruh komponen bangsa Jaminan Keadilan melalui penegakan hukum yang adil dan peradilan yang merdeka/tidak memihak		

No.	Lingkup isi PKN-BSNP	Kualitas Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab		
		Wawasan Demokrasi	Sikap Demokratis dan Tanggung Jawab	Perilaku Demokratis
	<p>Cinta lingkungan</p> <p>Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia</p> <p>Sikap positif terhadap NKRI</p> <p>Keterbukaan</p> <p>Hidup rukun dalam perbedaan</p> <p>Partisipasi dalam pembelaan negara</p>		<p>Cinta lingkungan untuk kemaslahatan masyarakat luas</p> <p>Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat</p> <p>Sikap positif thd NKRI yang diwujudkan dalam bentuk toleransi antar-umat beragama, antar-suku, antara golongan, dan antar ras.</p> <p>Keterbukaan sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai demokrasi</p>	<p>Hidup rukun dalam perbedaan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat</p> <p>Partisipasi dalam pembelaan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam bentuk menjaga keamanan lingkungan sekolah</p>
2	<p>Norma, Hukum, dan Peraturan:</p> <p>Tertib dalam kehidupan keluarga</p> <p>Tata Tertib di sekolah</p> <p>Norma yang berlaku di</p>	<p>Jaminan hak dan kewajiban dalam kehidupan untuk membangun ketertiban dalam keluarga.</p> <p>Jaminan hak dan kewajiban warga sekolah untuk membangun ketertiban di lingkungan sekolah</p> <p>Norma sebagai petunjuk hidup yang berisi</p>		

No.	Lingkup isi PKN-BSNP	Kualitas Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab		
		Wawasan Demokrasi	Sikap Demokratis dan Tanggung Jawab	Perilaku Demokratis
	<p>masyarakat,</p> <p>Peraturan-peraturan daerah</p> <p>Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Sistem hukum dan peradilan nasional</p> <p>Hukum dan peradilan internasional</p>	<p>perintah atau larangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,</p> <p>Peraturan-peraturan daerah sebagai sarana hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat daerah</p> <p>Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Sistem hukum dan peradilan nasional</p> <p>Hukum dan peradilan internasional</p>		
3	<p>Hak asasi manusia:</p> <p>Hak dan kewajiban anak</p> <p>Hak dan kewajiban anggota masyarakat</p> <p>Instrumen HAM nasional dan internasional</p> <p>Pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM</p>	<p>Jaminan hak dan kewajiban anak sebagai pemimpin atau penerus bangsa di masa depan.</p> <p>Jaminan hak dan kewajiban anggota masyarakat</p> <p>Instrumen HAM nasional dan internasional sebagai produk hukum untuk menjamin kehidupan nasional dan internasional yang berkeadilan.</p> <p>Pemajuan hak dan kewajiban , penghormatan hak dan kewajiban, dan perlindungan hukum sebagai esensi dari HAM</p>		
4	<p>Kebutuhan warga negara:</p>			

No.	Lingkup isi PKN-BSNP	Kualitas Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab		
		Wawasan Demokrasi	Sikap Demokratis dan Tanggung Jawab	Perilaku Demokratis
	<p>Persamaan kedudukan warga negara</p> <p>Harga diri sebagai warga masyarakat</p> <p>Kebebasan berorganisasi</p> <p>Kemerdekaan mengeluarkan pendapat</p> <p>Menghargai keputusan bersama</p> <p>Prestasi diri</p> <p>Hidup gotong royong</p>	<p>Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan</p>	<p>Harga diri sebagai warga masyarakat yang menjunjung HAM</p> <p>Kebebasan berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Kemerdekaan mengeluarkan pendapat melalui saluran resmi dengan penuh tanggung jawab</p> <p>Menghargai keputusan bersama dengan cara melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab</p> <p>Prestasi diri dalam menumbuhkan budaya unggul, kompetitif, dan aktualisasi diri</p>	<p>Hidup gotong royong</p>
5	<p>Konstitusi negara: Proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945</p> <p>Konstitusi RIS</p>	<p>Proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak dalam kehidupan bernegara RI dan keputusan politik tertinggi. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis pertama dalam membangun kehidupan negara RI yang demokratis. Konstitusi RIS yang</p>		

No.	Lingkup isi PKN-BSNP	Kualitas Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab		
		Wawasan Demokrasi	Sikap Demokratis dan Tanggung Jawab	Perilaku Demokratis
	<p>UUDS 1950</p> <p>UUD 145 dan Perubahannya</p> <p>Hubungan dasar negara dan Konstitusi</p>	<p>bersifat federal merupakan pengalaman pahit dalam mempertahankan NKRI UUDS 1950 yang bersifat uniter dengan sistem demokrasi liberal merupakan pengalaman pahit dalam merintis demokrasi dengan sistem multipartai UUD 1945 dan Perubahannya yang merupakan landasan konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru menuntut kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih demokratis dan bertanggung jawab Pancasila merupakan landasan idiil dalam kehidupan bernegara menurut UUD 1945 dan Perubahannya</p>		
6	<p>Kekuasaan dan politik: Pemerintahan desa dan kecamatan</p> <p>Pemerintahan daerah dan otonomi</p> <p>Pemerintahan Pusat</p> <p>Demokrasi dan sistem politik</p>	<p>Pemerintahan desa dan kecamatan sebagai sarana perwujudan demokrasi di tingkat terendah.</p> <p>Pemerintahan daerah merupakan wahana demokratis untuk mewujudkan otonomi daerah.</p> <p>Pemerintahan Pusat sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan negara.</p> <p>Sistem politik yang demokratis merupakan wahana bagi partisipasi</p>		<p>Perwujudan budaya demokrasi berdasarkan konsep masyarakat madani yang ditandai dengan persamaan, toleransi, taat hukum saling melindungi, bebas terbuka, dan bertanggung jawab</p> <p>Pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagai pilar</p>

No.	Lingkup isi PKN-BSNP	Kualitas Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab		
		Wawasan Demokrasi	Sikap Demokratis dan Tanggung Jawab	Perilaku Demokratis
	Budaya politik Sistem Pemerintahan	politik warga negara. Budaya politik merupakan sistem nilai yang melandasi pemikiran dan orientasi politik untuk menjalankan kehidupan bermegara Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.		masyarakat demokrasi
7.	Pancasila: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai ideologi terbuka Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Pancasila sebagai dasar negara merupakan pilar utama demokrasi konstitusional RI Pancasila sebagai ideologi negara merupakan keyakinan kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan indikator dari dinamika proses demokrasi untuk mencapai konsensus nasional negara Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin operasionalisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sepanjang zaman		Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
8	Globalisasi: Politik luar	Politik luar negeri RI		

No.	Lingkup isi PKN-BSNP	Kualitas Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab		
		Wawasan Demokrasi	Sikap Demokratis dan Tanggung Jawab	Perilaku Demokratis
	negeri di era globalisasi Hubungan internasional dan organisasi internasional Globalisasi di lingkungannya Dampak globalisasi Mengevaluasi globalisasi	yang bebas dan aktif menjamin terciptanya hubungan antarnegara yang harmonis di era globalisasi. Hubungan internasional RI dan keterlibatan RI dalam organisasi internasional merupakan wujud dari kesetaraan antar bangsa dengan landasan perdamaian abadi dan keadilan sosial		Berpikir global dan berperilaku lokal di lingkungannya Menghindarkan diri dari perilaku konsumtif dalam memasuki pergaulan dan interaksi global. Mengenali dampak positif dan negatif dari globalisasi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengadaptasikan diri dengan budaya global.

Semua kompetensi dasar untuk setiap kelas menuntut perilaku nyata (*overt behavior*). Hal ini berarti bahwa konsep dan nilai kewarganegaraan diajarkan tidak boleh berhenti pada pikiran semata, tetapi harus terwujudkan dalam perbuatan nyata.

Marilah kita ambil sebagai contoh Pengalaman Belajar yang merupakan implikasi pedagogis dari tuntutan pengembangan Kompetensi dasar untuk Kelas IV sebagai berikut.

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alternatif Pengalaman Belajar
1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan	<p>1.1 Mengetahui lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan</p> <p>1.2 Menggambar struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan</p>	<p>1.1. Siswa mempelajari dokumen tentang pemerintahan desanya dan kecamatannya dan beraudiensi dengan Lurah dan Camat di sekolah atau di kantornya untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya pemerintahan desa dan kecamatan.</p> <p>1.2. Siswa berdiskusi tentang (1) kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dengan menggunakan dokumen dan hasil audiensi dengan Lurah dan Camat; (2) hubungan timbal balik antara warga desa/kecamatan dengan pemerintahan desa/kecamatan; (3) Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan desa dan kecamatan.</p>
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi	<p>2.1 Mengetahui lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi</p> <p>2.2 Menggambar struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi</p>	<p>2.1. Siswa mempelajari dokumen tentang pemerintahan kabupaten/kota/provinsi dan beraudiensi dengan unsur pemerintah daerah dan di sekolah atau di kantornya untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya pemerintahan kabupaten/kota/provinsi</p> <p>2.2. Siswa berdiskusi tentang (1) kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dengan menggunakan dokumen dan hasil audiensi dengan unsur pemerintah daerah; (2) hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemerintahan daerah; (3) Hubungan struktural dan fungsional antarpemerintah daerah.</p>

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alternatif Pengalaman Belajar
<p>3. Mengetahui sistem pemerintahan tingkat pusat</p>	<p>3.1 Mengetahui lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK.</p> <p>3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri</p>	<p>3.1. Siswa mempelajari UUD 1945 dengan Perubahannya, serta undang-undang lainnya yang relevan; catatan/ulasan dalam media massa yang terkait lembaga-lembaga negara; dan bila perlu berdiskusi dengan unsur pimpinan lembaga-lembaga negara melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya kelembagaan pemerintahan negara.</p> <p>3.2. Siswa mengikuti acara cerdas cermat atau survei interaktif mengenai lembaga pemerintahan di sekolahnya/lingkungannya untuk melatih pemahaman tentang organisasi pemerintahan negara.</p>
<p>4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya</p>	<p>4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya</p> <p>4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional</p> <p>4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya</p>	<p>4.1. Siswa mengumpulkan contoh di lingkungannya tentang fakta terjadinya globalisasi, pengaruh globalisasi terhadap perilaku masyarakat, misalnya tumbuhnya Mal di kota besar, derasnya barang dan hasil bumi impor yang masuk dari luar negeri</p> <p>4.2. Siswa mengumpulkan contoh-contoh dari lingkungan tentang perubahan kebudayaan tradisional daerah sebagai dampak dari budaya internasional, seperti arsitektur rumah, desain pakaian, kesenian, pola hidup sehari-hari</p> <p>4.3. Siswa berdiskusi mengenai masalah "Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi dalam negeri, seperti buah-buahan, agar mampu</p>

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alternatif Pengalaman Belajar
		bersaing di pasaran dengan produksi luar negeri yang masuk ke Indonesia? "Setelah diskusi guru mengadakan acara refleksi/renungan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi pengaruh globalisasi secara cerdas dan bertanggung jawab?

Dengan kata lain PKN menuntut terwujudkannya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan belajar perilaku. PKN seharusnya tidak lagi memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar. Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKN adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk *confluent education* (Mc, Neil, 1981). Tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial guru-murid yang *kohesif*. Guru seyogianya *siap memberi contoh dan menjadi contoh*. Ingatlah pada postulat bahwa *Value is neither taught nor caught, it is learned* (Herman 1966). Nilai tidak bisa diajarkan atau pun ditangkap sendiri, tetapi dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, nilai harus termuat dalam materi pelajaran PKN.

PKN merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat *multidimensional*. Ia merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun, yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu, secara singkat PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi *pendidikan nilai dan moral*. Alasannya antara lain sebagai berikut.

1. Materi PPKn adalah *konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD 45* beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.
2. *Sasaran belajar akhir* PKN adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam *perilaku nyata* kehidupan sehari-hari.
3. Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu *bukan hanya dipahami* (bersifat kognitif), tetapi *dihayati* (bersifat objektif) dan *dilaksanakan* (bersifat perilaku).

Sebagai pengayaan teoretik, pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam PKn tersebut, dalam pandangan Lickona (1992) disebut "educating for character" atau "pendidikan watak" Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50-51), yakni *Compatible mix of all those virtues identified by religions traditions, literary stories, the sages, and persons of common sense down through history*. Artinya, suatu perpaduan yang harmonis dari berbagai *kebajikan* yang tertuang dalam *keagamaan*, sastra, pandangan kaum cerdik-pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman. Oleh karena itu, Lichona (1992, 51) memandang karakter atau watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni *moral knowing, moral feeling, and moral behavior* atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral. Bila buah pemikiran Lickona (1992) tersebut kita kaitkan dengan karakteristik PKn SD, nampaknya kita dapat menggunakan model Lickona itu sebagai kerangka pikir dalam melihat sasaran belajar dan isi PKn. Setiap konsep nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butir materi PKn pada dasarnya harus memiliki aspek *konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral*.

Contohnya, untuk butir materi tenggang rasa pembelajaran PKn harus menyentuh ketiga aspek seperti berikut.

1. Konsep Moral

- a. Kesadaran perlunya tenggang rasa
- b. Pemahaman tentang tenggang rasa
- c. Manfaat tenggang rasa di masa depan
- d. Alasan perlunya saling menenggang rasa
- e. Bagaimana memilih cara menenggang rasa
- f. Penilaian diri sendiri mengenai tenggang rasa

2. Sikap Moral

- a. Kata hati kita tentang orang lain
- b. Rasa percaya diri kita dalam berhadapan dengan orang lain
- c. Empati kita mengenai orang lain
- d. Cinta kita terhadap tenggang rasa
- e. Pengendalian diri kita untuk orang lain
- f. Rasa hormat kita kepada orang lain

3. Perilaku Moral

- a. Kemampuan menenggang rasa orang lain
- b. Kemauan menenggangkan rasa orang lain
- c. Kebiasaan menenggang rasa orang lain

Dari pembahasan kita mengenai PKN sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan watak kiranya kita dapat mencatat hal-hal sebagai berikut.

1. PKN sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila.
2. Nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 dapat dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai materi PPKn.

Oleh karena itu, bagi pendidikan di Indonesia PKN dapat dikatakan sebagai program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri peserta didik. Watak ini pembentukannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi keterpaduan konsep moral, sikap moral dan perilaku moral Pancasila dan UUD 45. Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa PKN merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa *compleement education*. Pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman Anda tentang implikasi pedagogis dari kompetensi dasar PKN, Anda diminta untuk mengerjakan Latihan mengembangkan **alternatif pengalaman belajar** seperti dicontohkan, untuk Kelas VI sebagai berikut!

Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alternatif Pengalaman Belajar
1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari	
2. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia	2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada 2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amendemen 2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah	

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alternatif Pengalaman Belajar
3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	3.1 Menjelaskan pengertian kerja sama negara-negara Asia Tenggara 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	
4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi	4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif 4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional	

Petunjuk Jawaban Latihan

Sebelum Anda mengerjakan latihan bacalah kembali materi tentang pengembangan alternatif belajar kelas VI SD.



RANGKUMAN

1. Setiap substansi PKN memiliki tuntunan pedagogis berupa pengalaman belajar (*learning experiences*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar.
2. Implikasi dari lingkup isi PKN SD/MI perlu dikaitkan dengan esensi kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, guru perlu merumuskan berbagai implikasi dari tuntutan isi PKN terhadap wawasan demokrasi, sikap demokratis dan tanggung jawab, serta perilaku demokratis.
3. Pada dasarnya PKN menuntut terwujudkannya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan belajar perilaku. Oleh karena itu, PKN seharusnya tidak lagi memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar.
4. Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKN adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk *confluent education*.
5. Tuntutan pedagogis memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial guru-murid yang *kohesif*. Guru seyogianya *siap memberi contoh dan menjadi contoh*.
6. Dalam PKN berlaku pada postulat bahwa *Value is neither taught now caught, it is learned*. Postulat tersebut mengandung makna bahwa nilai tidak bisa diajarkan atau pun ditangkap sendiri tetapi dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, nilai harus termuat dalam materi pelajaran PKN.
7. Untuk Standar Kompetensi Mengenal “Sistem pemerintahan tingkat pusat” yang diturunkan menjadi Kompetensi dasar “Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK. Dapat dijabarkan Pengalaman Belajar “Siswa mempelajari dokumen tentang pemerintahan desanya dan kecamatannya dan beraudiensi dengan Lurah dan Camat di sekolah atau di kantornya untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya pemerintahan desa dan kecamatan.”

dan “Siswa berdiskusi tentang (1) kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dengan menggunakan dokumen dan hasil audiensi dengan Lurah dan Camat; (2) hubungan timbal balik antara warga desa/kecamatan dengan pemerintahan desa/kecamatan; (3) Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan desa dan kecamatan.”

8. PKn merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat *multidimensional* karena merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun, yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu, secara singkat PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi *pendidikan nilai* dan *moral*.
9. PKn merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri peserta didik. Watak ini pembentukannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi keterpaduan konsep moral, sikap moral dan perilaku moral demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan UUD 45. Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa PKn merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa *confluent education* yang memusatkan perhatian pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Setiap substansi PKn memiliki tuntunan pedagogis berupa pengalaman belajar (*learning experiences*) yang diperlukan untuk
 - A. mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan
 - B. memenuhi pesan moral pendidikan kewarganegaraan
 - C. menggapai visi pendidikan kewarganegaraan
 - D. melandasi pendidikan kewarganegaraan
- 2) Pengalaman belajar (*learning experiences*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, memberi konteks terhadap
 - A. kelengkapan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar

- B. saling keterkaitan antar kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar
 - C. ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar
 - D. akuntabilitas kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar
- 3) Implikasi dari lingkup isi PKN SD/MI perlu dikaitkan dengan
- A. potensi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab
 - B. esensi kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab
 - C. problematika warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab
 - D. praksis kehidupan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab
- 4) Kompetensi dasar PKN memiliki kandungan perilaku warga negara berupa
- A. wawasan demokrasi, sikap demokratis, tanggung jawab, dan perilaku demokratis
 - B. wawasan demokrasi atau sikap demokratis atau tanggung jawab atau perilaku demokratis
 - C. wawasan demokrasi, sikap demokratis dan tanggung jawab, serta perilaku demokratis
 - D. wawasan demokrasi, sikap demokratis, tanggung jawab, dan/atau perilaku demokratis
- 5) Pada dasarnya PKN menuntut terwujudkannya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan belajar perilaku. Oleh karena itu, PKN
- A. perlu memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar
 - B. tidak dapat memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar
 - C. seharusnya tidak memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar
 - D. sebaiknya memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar
- 6) Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKN berupa pendidikan yang terpadu utuh, disebut sebagai
- A. *competency-based education*
 - B. *concurrent education*

- C. *value related education*
 - D. *confluent education*
- 7) Tuntutan pedagogis memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial guru-murid yang *kohesif*. Untuk itu, Guru seyogianya
- A. mau memberi contoh dan menjadi contoh
 - B. mampu memberi contoh dan menjadi contoh
 - C. biasa memberi contoh dan menjadi contoh
 - D. sering memberi contoh dan menjadi contoh
- 8) Dalam PKn berlaku pada postulat bahwa *Value is neither taught nor cougth, it is learned*. Postulat tersebut mengandung makna bahwa nilai tidak bisa diajarkan atau pun ditangkap sendiri, tetapi dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, nilai
- A. dapat di muat dalam materi pelajaran PKn
 - B. harus terkait dengan materi pelajaran PKn
 - C. harus termuat dalam materi pelajaran PKn
 - D. dapat diintegrasikan dalam materi pelajaran PKn
- 9) Standar Kompetensi Mengenal “Sistem pemerintahan tingkat pusat” diturunkan menjadi Kompetensi dasar “Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK. Jabaran Pengalaman Belajar “Siswa mempelajari dokumen tentang pemerintahan desanya dan kecamatannya dan beraudiensi dengan Lurah dan Camat di sekolah atau di kantornya untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya pemerintahan desa dan kecamatan,” secara pedagogis merupakan
- A. sarana pembelajaran untuk menjabarkan kompetensi
 - B. media pembelajaran untuk mengkomunikasikan kompetensi
 - C. wahana pembelajaran untuk menguasai kompetensi
 - D. kriteria pembelajaran untuk mengukur penguasaan kompetensi
- 10) Pengalaman belajar “Siswa berdiskusi tentang (1) kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dengan menggunakan dokumen dan hasil audiensi dengan Lurah dan Camat; (2) hubungan timbal balik antara warga desa/kecamatan dengan pemerintahan desa/kecamatan; (3) Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan desa dan kecamatan.” Secara psikologis-pedagogis akan dapat memfasilitasi pengembangan
- A. wawasan demokrasi dan perilaku hidup demokratis
 - B. sikap dan nilai demokrasi serta keterampilan berdemokrasi

- C. kesadaran dan perilaku hidup berdemokrasi
- D. norma dan etika dalam kehidupan berdemokrasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) B
- 3) D
- 4) B
- 5) D
- 6) B
- 7) D
- 8) A
- 9) D
- 10) B

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) C
- 3) D
- 4) A
- 5) D
- 6) C
- 7) D
- 8) D
- 9) D
- 10) A

Tes Formatif 3

- 1) A
- 2) C
- 3) B
- 4) C
- 5) C
- 6) D
- 7) B
- 8) C
- 9) A
- 10) B

Daftar Pustaka

- Arbuthnot, J.B and Faust, D. (1981). *Teaching Moral Reasoning: Theory and Practice*. New York: Harper and Row.
- Beck, C.M., Critender, BS, and Sullivan, E.V. (1981). *Moral Education: Interdisciplinary Approach*. Toronto: University of Toronto Press.
- Daley, L.C. (1965). *Phylosophy*. New York: College Notes
- Dekdikbud. (1986). *Kurikulum Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: Balitbang Dikbud.
- _____. (1993). *Kurikulum Pendidikan Dasar*. Jakarta.
- Djahiri, AR. (1993). *Laporan Kelompok Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Balitbang Dikbud.
- Duska, R. and Whellan DJ. (1977). *Moral Development*. London: Bill and Mc Millan.
- Feczal, J.D. (1985). *Toward A Congluent Taxonomy of Cognitive, Affective, and Psychomotor Abilities in Communication*, 34.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character*. New York: Bantam Books.
- Mc Neil, J.D. (1977). *Curriculum: A Comprehensive Introduction*, Boston: Little Brown and Co.
- Newmann, F.M. (1977). *Building a Rationales for Civic Education* and Shaver, J.P. (1977) *Building Rationales for Citizenship Education*, Arlington: NCSS.
- Republik Indonesia. (2003) *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas

- _____. (2003) *Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2006) *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi* Jakarta: Depdiknas.
- Somantri, N. (1968). *Pendidikan Kewargaan Negara di Sekolah*. Bandung: IKIP.
- Simon, S.B. How, L.W. and Kirchenbaum H. (1972). *Values Clarification*. New York: Hart Publishing Co.
- Winataputra, U.S. (1978). *A pilot Study of Implementation of the Area of Learning Moral Education of Pancasila in the 1975 SMA Curriculum in the Bandung Area* (Postgraduate Project). Sydney: Macquarie University
- Winataputra, U.S. (2001). *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*. (Disertasi) Bandung: universitas Pendidikan Indonesia.